

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian, Tujuan, Sifat Laporan Keuangan, Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan dan Jenis Laporan Keuangan.

Dalam praktiknya laporan keuangan oleh perusahaan tidak dibuat secara serampangan, tetapi harus dibuat dan disusun sesuai dengan aturan atau standar yang berlaku. Hal ini perlu dilakukan agar laporan keuangan mudah dibaca dan dimengerti. Laporan keuangan yang disajikan perusahaan sangat penting bagi manajemen dan pemilik perusahaan. Di samping itu, banyak pihak yang memerlukan dan berkepentingan terhadap laporan keuangan yang dibuat perusahaan, seperti pemerintah, kreditor, investor maupun para supplier. Dalam hal laporan keuangan, sudah merupakan kewajiban setiap perusahaan untuk membuat dan melaporkan keuangan perusahaannya pada suatu periode tertentu. Hal yang dilaporkan kemudian dianalisis sehingga dapat diketahui kondisi dan posisi perusahaan terkini. Kemudian laporan keuangan juga akan menentukan langkah apa yang dilakukan perusahaan sekarang dan ke depan, dengan melihat berbagai persoalan yang ada baik kelemahan maupun kekuatan yang dimilikinya.

Menurut Aliminsyah dan Padji (2012:225) dalam bukunya yang berjudul “Kamus Istilah Akuntansi” menyatakan, Laporan keuangan adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan baik didalam maupun diluar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi atau laba, dan laporan perubahan posisi keuangan.

Menurut Bambang Riyanto (2012:327) mengungkapkan bahwa:

“Laporan *Finansiil* (*Financial Statement*), memberikan ikhtisar mengenai keadaan *finansiil* suatu perusahaan, dimana neraca (*Balance Sheets*) mencerminkan nilai aktiva, utang dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, dan laporan rugi dan laba (*Income Statement*) mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode satu tahun”.

Menurut Kasmir (2014:7) dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah “Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:1) laporan keuangan adalah “Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”.

Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disimpulkan laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini dalam suatu periode tertentu yang dituangkan dalam bentuk neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang berguna bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan arus data perusahaan tersebut.

2.1.1 Tujuan Laporan Keuangan

Seperti diketahui bahwa setiap laporan keuangan yang dibuat sudah pasti memiliki tujuan tertentu. Dalam praktiknya terdapat beberapa tujuan yang hendak dicapai, terutama bagi pemilik usaha dan manajemen perusahaan. Di samping itu, tujuan laporan keuangan disusun guna memenuhi kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan. Secara umum laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. Laporan keuangan juga dapat disusun secara mendadak sesuai kebutuhan perusahaan maupun secara berkala. Jelasnya adalah laporan keuangan mampu memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam dan luar perusahaan yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Berikut ini beberapa tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

Menurut Kasmir (2013:11) tujuan pembuatan atau penyusunan laporan keuangan yaitu:

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan saat ini.
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Dapat di simpulkan, dengan memperoleh laporan keuangan suatu perusahaan, akan dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan secara menyeluruh.

2.1.2 Sifat Laporan Keuangan

Pencatatan yang dilakukan dalam penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Demikian pula dalam hal penyusunan laporan keuangan didasarkan kepada sifat laporan keuangan itu sendiri. Dalam praktiknya sifat laporan keuangan dibuat:

1. Bersifat historis
2. Menyeluruh

Bersifat historis artinya bahwa laporan keuangan dibuat dan disusun dari data masa lalu atau masa yang sudah lewat dari masa sekarang. Misalnya laporan keuangan disusun berdasarkan data satu atau dua atau beberapa tahun ke belakang (tahun atau periode sebelumnya). Kemudian sifat menyeluruh artinya laporan keuangan dibuat selengkap mungkin, artinya laporan keuangan disusun sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pembuatan atau penyusunan yang hanya sebagian-sebagian (tidak lengkap) tidak akan memberikan informasi yang lengkap tentang keuangan suatu perusahaan.

2.1.3 Pihak-Pihak yang Memerlukan Laporan Keuangan

Pembuatan dan penyusunan laporan keuangan ditujukan untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak, berikut ini penjelasan masing-masing pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan:

1. Pemilik

Pemilik pada saat ini adalah mereka yang memiliki usaha tersebut. Hal ini tercermin dari kepemilikan saham yang dimilikinya. Kepentingan bagi para pemegang saham yang merupakan pemilik perusahaan terhadap hasil laporan keuangan yang telah dibuat adalah:

- a. Untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini.
- b. Untuk melihat perkembangan dan kemajuan perusahaan dalam suatu periode.
- c. Untuk menilai kinerja manajemen atas target yang telah diterapkan.

2. Investor

Investor adalah pihak yang hendak menanamkan dana di suatu perusahaan. Jika suatu perusahaan memerlukan dana untuk memperluas usaha atau kapasitas usahanya di samping memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan seperti bank dapat pula diperoleh dari para investor melalui penjualan saham.

3. Manajemen

Kepentingan pihak manajemen perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan yang mereka buat juga memiliki arti tertentu. Bagi pihak manajemen laporan keuangan yang dibuat merupakan cermin kinerja mereka dalam suatu periode tertentu.

4. Kreditor

Kreditor adalah pihak penyandang dana bagi perusahaan. Artinya pihak pemberi dana seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Kepentingan pihak kreditor terhadap laporan keuangan perusahaan adalah dalam hal memberi pinjaman. Bagi pihak kreditor, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana (pinjaman) kepada berbagai perusahaan sangat diperlukan.

5. Pelanggan

Para pelanggan berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup perusahaan terutama kalau mereka terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan, atau bergantung pada perusahaan.

6. Pemerintah

Pemerintah juga memiliki nilai penting atas laporan keuangan yang dibuat perusahaan. Bahkan pemerintah melalui Departemen Keuangan mewajibkan kepada setiap perusahaan untuk menyusun dan melaporkan keuangan perusahaan secara periodik.

7. Masyarakat

Perusahaan mempengaruhi anggota masyarakat dalam berbagai cara. Misalnya, perusahaan dapat memberikan kontribusi berarti pada perekonomian nasional, termasuk jumlah orang yang diperkerjakan dan perlindungan kepada penanam modal domestik. Laporan keuangan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi kecenderungan (tren) dan perkembangan terakhir kemakmuran perusahaan serta rangkaian aktivitasnya.

2.1.4 Jenis Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari beberapa jenis, tergantung dari maksud dan tujuan pembuatan laporan keuangan tersebut. Masing-masing laporan keuangan memiliki arti sendiri dalam melihat kondisi keuangan perusahaan, baik secara bagian, maupun secara keseluruhan.

Penyusunan laporan keuangan terkadang disesuaikan juga dengan kondisi perubahan kebutuhan perusahaan. Artinya jika tidak ada perubahan dalam laporan tersebut, tidak perlu dibuat sebagai contoh laporan perubahan modal atau laporan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Kasmir (2014:58), ada lima jenis laporan keuangan yaitu:

1. Neraca (*Balance Sheet*)
Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan jumlah aktiva (harta), kewajiban (utang) dan modal perusahaan (ekuitas) perusahaan pada saat tertentu.
 2. Laporan Laba Rugi (*Income Statement*)
Laporan laba rugi merupakan laporan yang menunjukkan kondisi usaha dalam suatu periode tertentu yang tergambar dari jumlah pendapatan yang diterima dan biaya yang telah dikeluarkan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan dalam keadaan laba atau rugi.
 3. Laporan Perubahan Modal (*Capital Statement*)
Laporan perubahan modal menggambarkan jumlah modal yang dimiliki perusahaan saat ini serta sebab-sebab berubahnya modal.
 4. Laporan Arus Kas (*Cash Flow*)
Laporan arus kas merupakan laporan keuangan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengalaman langsung atau tidak langsung terhadap kas.
 5. Laporan Catatan atas Laporan Keuangan
Laporan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang dibuat berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan.
- Laporan keuangan yang lengkap menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK. No. 1 (2015:1.3) terdiri dari komponen-komponen berikut ini:
- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
 - b. Laporan laba rugi dari penghasilan komprehensif lain selama periode.
 - c. Laporan perubahan ekuitas selama periode.
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
 - e. Laporan posisi keuangan pada awal periode.

Dari uraian-uraian diatas, dapat di simpulkan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota, dan catatan atas laporan keuangan.

2.2 Pengertian, Landasan, Asas, Prinsip-Prinsip Koperasi, dan Penggolongan Koperasi

Pada umumnya orang menganggap koperasi adalah sebagai organisasi sosial yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak mencari keuntungan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa koperasi itu hanya untuk memenuhi kebutuhan anggotanya saja, dan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa koperasi itu hanya memakmuran pengurusnya saja.

2.2.1 Pengertian Koperasi

Pengertian koperasi berasal dari bahasa inggris *co-operation* yang berarti usaha bersama. Dengan kata lain berarti segala pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat disebut koperasi. Berikut ini beberapa pengertian koperasi menurut para ahli:

Menurut Hatta dalam buku Subandi yang berjudul *Ekonomi Koperasi* (2012:57) “Koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum lemah untuk membela keperluan hidupnya. Mencapai keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, itulah yang dituju”.

Sedangkan koperasi menurut Khasmir (2012:270) merupakan “Bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama”.

Menurut Subandi (2013:2) pengertian koperasi adalah “Suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memecahkan permasalahan ekonomi yang dihadapinya”.

Berdasarkan pengertian-pengertian koperasi di atas, dapat di simpulkan bahwa koperasi adalah suatu sistem sendiri dalam kehidupan ekonomi masyarakat yang dibentuk dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama.

2.2.2 Landasan dan Asas Koperasi

Landasan dan asas koperasi pada umumnya terdiri dari tiga hal sebagai berikut:

1. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsur ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idiil yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
2. Semua ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur agar filsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral bangsa benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
3. Adanya rasa karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong-menolong di antara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerjasama dengan orang lain.

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan, peran serta kedudukan koperasi terhadap pelaku-pelaku ekonomi lainnya di dalam sistem perekonomian Indonesia. Dalam Undang-Undang No.25/1992 tentang pokok-pokok landasan Idiil, sesuai dengan bab II Undang-Undang No.25/1992, landasan Idiil koperasi adalah Pancasila dan landasan Struktural adalah Undang-Undang Dasar 1945. Asas Koperasi berdasarkan pasal ke 2 UU No.25/1992 adalah kekeluargaan.

2.2.3 Prinsip-Prinsip Koperasi

Penyusunan prinsip koperasi di Indonesia tidak terlepas dari sejarah perkembangan koperasi secara internasional. Dalam mempelajari prinsip koperasi, internasional, disadari bahwa penyusunan prinsip koperasi Indonesia harus sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan koperasi di Indonesia.

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 15 ayat 1 UU No.25/1992, koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian balas jasa yang terbatas pada modal.
5. Kemandirian.

2.2.4 Penggolongan Koperasi

Pengolongan koperasi adalah pengelompokkan koperasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan kriteria dan karakteristik yang tertentu pula.

1. Pengelompokkan koperasi berdasarkan bidang usaha dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Koperasi konsumsi

adalah koperasi yang berusaha dalam bidang penyediaan barang-barang konsumsi yang dibutuhkan oleh para anggotanya.

b. Koperasi Produksi

adalah koperasi yang kegiatan utamanya memproses bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi.

c. Koperasi Pemasaran

adalah koperasi yang dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya dalam memasarkan barang-barang yang dihasilkannya.

d. Koperasi kredit atau simpan pinjam

adalah koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya.

2. Koperasi berdasarkan jenis komoditi

Berdasarkan jenis komoditinya, maka koperasi dapat dibedakan menjadi:

a. Koperasi ekstraktif

adalah koperasi yang melakukan usaha dengan menggali atau memanfaatkan sumber-sumber alam secara langsung tanpa atau dengan sedikit mengubah bentuk dan sifat sumber alam itu.

b. Koperasi Pertanian dan peternakan

adalah koperasi yang melakukan usaha berhubungan dengan komoditi pertanian dan peternakan tertentu.

c. Koperasi industri dan kerajinan

adalah koperasi yang melakukan usaha di bidang industri dan kerajinan tertentu.

3. Koperasi berdasarkan profesi anggotanya

Berdasarkan profesi anggotanya, koperasi dapat dibedakan menjadi:

- a. Koperasi karyawan.
- b. Koperasi Pegawai Negeri Sipil.
- c. Koperasi Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polri.
- d. Koperasi Mahasiswa.
- e. Koperasi Pedagang besar.
- f. Koperasi Nelayan.
- g. Koperasi Kerajinan.

4. Koperasi berdasarkan daerah kerjanya

Koperasi ini digolongkan menjadi:

- a. Koperasi Primer
adalah koperasi yang beranggotakan orang yang biasanya didirikan pada lingkup wilayah terkecil tertentu.
- b. Koperasi Pusat
adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi primer yang didirikan sebagai pemusatan dari berbagai koperasi primer dalam lingkup wilayah tertentu.
- c. Koperasi Gabungan
adalah koperasi yang beranggotakan koperasi-koperasi pusat yang berasal dari wilayah tertentu.
- d. Koperasi Induk
adalah koperasi yang beranggotakan berbagai koperasi pusat atau koperasi-koperasi gabungan yang berkedudukan di Ibukota Negara.

2.3 Pengertian Analisis Laporan Keuangan, Tujuan dan Manfaat Analisis, Bentuk-Bentuk dan Teknik Analisis

2.3.1 Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Setelah laporan keuangan disusun berdasarkan data yang relevan, serta dilakukan dengan prosedur akuntansi dan penilaian yang benar, akan terlihat kondisi keuangan perusahaan yang sesungguhnya. Kondisi keuangan yang dimaksud adalah diketahuinya berapa jumlah harta (kekayaan), kewajiban (utang), serta modal (ekuitas) dalam neraca yang dimiliki. Kemudian, juga akan diketahui

jumlah pendapatan yang diterima dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana hasil usaha (laba atau rugi) yang diperoleh selama periode tertentu dari laporan laba rugi yang disajikan.

Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi tentang kelemahan ini, manajemen akan dapat memperbaiki atau menutupi kelemahan tersebut. Kemudian, kekuatan yang dimiliki perusahaan harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Menurut Munawir (2013:35) analisis laporan keuangan meliputi “Penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan”.

Analisis laporan keuangan perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan metode dan teknik analisis yang tepat sehingga hasil yang diharapkan benar-benar tepat pula. Kesalahan dalam memasukkan angka atau rumus akan berakibat pada tidak akuratnya hasil yang hendak dicapai. Kemudian hasil perhitungan tersebut, dianalisis dan diinterpretasikan sehingga diketahui posisi keuangan yang sesungguhnya. Kesemuanya ini harus dilakukan secara teliti, mendalam, dan jujur.

2.3.2 Tujuan dan Manfaat Analisis

Kegiatan dalam analisis laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara menentukan dan mengukur antara pos-pos yang ada dalam satu laporan keuangan. Kemudian, analisis laporan keuangan juga dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang dimiliki dalam satu periode. Di samping itu, analisis laporan keuangan dapat dilakukan pula antara beberapa periode (misalnya tiga tahun).

Analisis laporan keuangan yang dilakukan untuk beberapa periode adalah menganalisis antara pos-pos yang ada dalam satu laporan. Atau dapat pula dilakukan antara satu laporan dengan laporan lainnya. Hal ini dilakukan agar lebih

tepat dalam menilai kemajuan atau kinerja manajemen dari periode ke periode selanjutnya.

Menurut Kasmir (2013:68) mengatakan ada beberapa tujuan dan manfaat bagi berbagai pihak dengan adanya analisis laporan keuangan. Secara umum dikatakan bahwa tujuan dan manfaat analisis laporan keuangan adalah :

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode tertentu.
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan.
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki.
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini.
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal.
6. Dapat juga digunakan sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

2.3.3 Bentuk-bentuk dan Teknik Analisis

Untuk melakukan analisis laporan keuangan diperlukan metode dan teknik analisis yang tepat. Tujuan penentuan metode dan teknik analisis yang tepat adalah agar laporan keuangan tersebut dapat memberikan hasil yang maksimal. Selain itu, para pengguna hasil analisis tersebut dapat dengan mudah untuk menginterpretasikannya.

Sebelum melakukan analisis laporan keuangan, diperlukan langkah-langkah atau prosedur tertentu. Langkah atau prosedur ini diperlukan agar urutan proses analisis mudah untuk dilakukan. Adapun langkah atau prosedur yang dilakukan dalam analisis laporan keuangan adalah:

1. Mengumpulkan data keuangan dan data pendukung yang diperlukan selengkap mungkin, baik untuk satu periode maupun beberapa periode.
2. Melakukan pengukuran-pengukuran atau perhitungan-perhitungan dengan rumus-rumus tertentu, sesuai dengan standar yang biasa digunakan secara cermat dan teliti, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar tepat.
3. Melakukan perhitungan dengan memasukkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan secara cermat.

4. Memberikan interpretasi terhadap hasil perhitungan dan pengukuran yang telah dibuat.
5. Membuat laporan tentang posisi keuangan perusahaan
6. Memberikan rekomendasi yang dibutuhkan sehubungan dengan hasil analisis tersebut.

Dalam praktiknya terdapat dua macam metode analisis laporan keuangan yang biasa dipakai, yaitu sebagai berikut:

1. Analisis Vertikal (Statis)

Analisis vertikal merupakan analisis yang dilakukan atas satu periode laporan keuangan saja.

2. Analisis Horizontal (Dinamis)

Analisis horizontal merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode.

Disamping metode yang digunakan, terdapat salah satu teknik analisis laporan keuangan yaitu analisis rasio keuangan.

Menurut Irham Fahmy (2012:106) rasio keuangan adalah “Hasil yang diperoleh dari perbandingan jumlah, dari satu jumlah dengan jumlah lainnya”.

Sedangkan menurut Sofyan Syafri Harahap (2014:297) Rasio Keuangan adalah “Angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti)”.

Berikut ini adalah bentuk-bentuk rasio keuangan menurut beberapa ahli keuangan yaitu:

Menurut Martono dan Agus (2014:53), bentuk-bentuk rasio keuangan adalah sebagai berikut:

1. Rasio likuiditas (Liquidity Ratio)

Rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi atau kewajiban jangka pendek.

2. Rasio Aktivitas (Activity Ratio)

Rasio aktivitas dikenal juga sebagai rasio efisiensi, yaitu yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset-asetnya.

3. Rasio Lverage (Lverage Ratio)

Rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman)

4. Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)

Rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya.

2.4 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja merupakan tingkat prestasi atau hasil nyata yang dicapai dan kadang-kadang dipergunakan untuk diperoleh suatu hasil positif. Menurut IAI (2012) kinerja didefinisikan sebagai “Kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya”.

Kinerja keuangan perusahaan atau badan usaha merupakan hasil dari banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Dalam membahas metode penilaian kinerja keuangan, perusahaan atau badan usaha harus didasarkan pada data keuangan yang dipublikasikan yang dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum. Laporan ini merupakan data yang paling umum yang tersedia untuk tujuan tersebut, walaupun seringkali tidak mewakili hasil dan kondisi ekonomi. Laporan keuangan disebut sebagai “kartu skor” periodik yang memuat hasil investasi operasi dan pembiayaan perusahaan, maka fokus akan diarahkan pada hubungan dan indikator keuangan yang memungkinkan analisa penilaian kinerja masa lalu dan juga proyeksi hasil masa depan dimana akan menekankan pada manfaat serta keterbatasan yang terkandung didalamnya.

Menurut Munawir (2012:31) menyatakan bahwa tujuan dari pengukuran kinerja keuangan perusahaan adalah:

1. Mengetahui tingkat likuiditas. Likuiditas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih.
2. Mengetahui tingkat solvabilitas. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, baik keuangan jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Mengetahui tingkat rentabilitas. Rentabilitas atau yang sering disebut dengan profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Mengetahui tingkat stabilitas. Stabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk

membayar hutang-hutangnya serta membayar beban bunga atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya.

Menurut pengertian kinerja keuangan yang telah dikemukakan, maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimilikinya

2.5 Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor:06/PER/DEP.6/IV/2016.

Peraturan deputi ini merupakan ketentuan yang menjadi dasar hukum yang kuat bagi koperasi untuk melaksanakan kegiatan usahanya terutama kegiatan usaha simpan pinjam dan dikelola secara profesional. Dengan dikeluarkannya Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 April 2016 oleh Deputi Bidang Pengawasan Meliadi Sembiring, diharapkan hasil yang diperoleh dari penilaian tersebut dapat menunjukkan kriteria kinerja koperasi. Hal ini dapat membantu koperasi untuk melihat kelamahan-kelemahan yang menjadi kekurangan yang harus diperbaiki dan kekuatan-kekuatan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Penilaian aspek dilakukan menggunakan nilai 0 sampai dengan 100 yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1

Penilaian Kinerja KSP dan USP Koperasi

No	Aspek yang Dinilai	Komponen	Bobot Penilaian
1	Permodalan		15

		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$ b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman yang Diterima yang Berisiko}} \times 100\%$ c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	6 6 3	
2	Kualitas Aktiva Produktif			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume Pinjaman pada anggota}}{\text{Volume pinjaman}} \times 100\%$ b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman Bermasalah}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$ c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\%$ d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman yang Berisiko}}{\text{Pinjaman yang Diberikan}} \times 100\%$	10 5 5 5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum b. Kelembagaan c. Manajemen Permodalan d. Manajemen Aktiva e. Manajemen Likuiditas	3 3 3 3 3	
4	Efisiensi			10
		a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$ c. Rasio Efisiensi Pelayanan	4 4 2	

		$\frac{\text{Biaya Karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$		
5	Likuiditas			15
		a. Rasio kas $\frac{\text{Kas + Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima $\frac{\text{Pinjaman yang Diberikan}}{\text{Dana yang Diterima}} \times 100\%$	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		a. Rentabilitas Asset $\frac{\text{SHU sebelum pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$	3	
		b. Rentabilitas Modal Sendiri $\frac{\text{SHU Bagian Anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		c. Kemandirian Operasional Pelayanan Partisipasi Neto $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban Usaha + Beban Perkoperasian}} \times 100\%$	4	
7	Jati Diri Koperasi			10
		a. Rasio partisipasi bruto $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto + Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota PEA $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\%$	3	
Jumlah				100

Sumber: Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Inonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016

Tabel 2.1 berisi rasio keuangan menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06 /Per/Dep.6/IV/2016 yang dapat dipergunakan untuk menilai kinerja koperasi simpan pinjam karya mulya dengan penjelasan sebagai berikut:

1.Aspek Permodalan.

Aspek permodalan adalah rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kecukupan modal perusahaan atau badan usaha untuk mendukung aktivitasnya. Rasio ini juga digunakan untuk menilai apakah kekayaan perusahaan atau badan usaha bertambah atau berkurang. Rasio permodalan terdiri dari:

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk rasio antara modal sendiri dengan total aset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
 2. Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
 3. Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% nilai dikurangi 5.
 4. Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan
- Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1,50
$20 \leq x < 40$	50	6	3,00
$40 \leq x < 60$	100	6	6,00
$60 \leq x < 80$	50	6	3,00
$80 \leq x < 100$	25	6	1,50

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko.

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, ditetapkan sebagai berikut :

1. Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
2. Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
3. Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8

$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

1. Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
2. Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
3. ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva Koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
4. Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.
5. Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kecukupan modal sendiri dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq x < 6$	50	3	1,50
$6 \leq x < 8$	75	3	2,25
> 8	100	3	3,00

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Aspek kualitas aktiva produktif adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kualitas kekayaan perusahaan atau badan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan. Rasio kualitas aktiva produktif terdiri dari:

a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota Terhadap Total Volume Pinjaman Diberikan

Untuk mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total pinjaman diberikan dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5

**Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota
terhadap Total Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 - 50	10	10	5,00
51 - 75	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman Diberikan

Untuk memperoleh rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut:

- Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut:
 - 50% dari pinjaman diberikan yang kurang lancar (PKL);
 - 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR); dan
 - 100% dari pinjaman diberikan yang macet (PM).
- Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.

$$RPM = \frac{(50\% \times PKL) + (75\% \times PDR) + (100\% \times PM)}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

3. Perhitungan penilaian:

- Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0.
- Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100 dan
- Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6
**Standar Perhitungan Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah
terhadap Pinjaman Diberikan**

Rasio (%)	Nilai	Bobot	Skor
≤ 45	0	5	0
40 < x < 45	10	5	0,5
30 < x < 40	20	5	1,0
20 < x < 30	40	5	2,0
10 < x < 20	60	5	3,0
0 < x < 10	80	5	4,0
0	100	5	5,0

c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah
Dihitung dengan Cara sebagai berikut:

- Untuk rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;

2. Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100; dan
 3. Nilai dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.
- Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1 - 10	10	5	0,5
11 - 20	20	5	1,0
21 - 30	30	5	1,5
31 - 40	40	5	2,0
41 - 50	50	5	2,5
51 - 60	60	5	3,0
61 - 70	70	5	3,5
71 - 80	80	5	4,0
81 - 90	90	5	4,5
91 - 100	100	5	5,0

- d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan.
- Untuk lebih jelasnya mengenai standar rasio perhitungan rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
25 - 30	50	5	2,50
21 - 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

3. Aspek Manajemen

Aspek manajemen adalah rasio penilaian yang digunakan untuk menilai kemampuan manajemen koperasi yang diterapkan. Aspek manajemen meliputi lima komponen yakni manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva dan manajemen likuiditas. Perhitungan nilai didasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen yang terdiri atas:

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
- Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen umum dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	0,10
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen kelembagaan dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen permodalan dapat dilihat pada tabel 2.11.

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen aktiva dapat dilihat pada tabel 2.12.

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan "ya").
Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan manajemen likuiditas dapat dilihat pada tabel 2.13.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

4. Aspek Efisiensi.

Aspek efisiensi adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan koperasi dalam mengendalikan pengeluaran biaya operasional, sehingga semakin kecil pengeluaran operasional terhadap pendapatan operasional, dan semakin kecil nilai inventaris terhadap besarnya jumlah modal koperasi berarti semakin baiklah efisiensi suatu koperasi. Aspek efisiensi koperasi didasarkan pada tiga rasio, yaitu:

- a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto
Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.
Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.14

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan
terhadap Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$\leq 95 - < 100$	50	4	2
$\leq 90 - < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai perhitungan rasio beban usaha terhadap SHU kotor dapat dilihat pada tabel 2.15 di halaman berikutnya.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
$0 < x \leq 40$	100	4	4

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Perhitungan rasio efisiensi pelayanan dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman. Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio efisiensi pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
> 15	0	2	0,0

5. Aspek Likuiditas.

Aspek likuiditas adalah rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka

pendek serta penilaian kuantitatif terhadap likuiditas koperasi. Penilaian likuiditas didasarkan atas:

a. Rasio Kas Bank terhadap Kewajiban Lancar.

Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih besar dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25. Nilai dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian. Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar dapat dilihat pada tabel 2.7 di halaman berikutnya.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman terhadap dana yang diterima, untuk rasio pinjaman lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dapat dilihat pada tabel 2.18.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$70 \leq x < 80$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek kemandirian dan pertumbuhan adalah rasio yang digunakan untuk penilaian kemandirian dan pertumbuhan koperasi yang

didasarkan pada rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas dan kemandirian operasional dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Rasio Rentabilitas Aset

Rasio rentabilitas aset adalah SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total aset, untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas aset dapat dilihat pada tabel 2.19 di halaman berikutnya.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 < x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x \leq 10$	75	3	2,25
>10	100	3	3,00

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri adalah SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio rentabilitas modal sendiri dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional pelayanan adalah partisipasi neto dibandingkan beban usaha ditambah beban perkoperasian, untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100. Nilai dikalikan dengan bobot 4% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio kemandirian operasional pelayanan dapat dilihat pada tabel 2.21

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

7. Aspek Jati Diri Koperasi

Aspek jati diri koperasi adalah rasio yang dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua rasio, yaitu:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa kepada anggota, yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran rasio partisipasi bruto dihitung dengan membandingkan partisipasi bruto terhadap partisipasi bruto ditambah pendapatan. Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 7 % diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel 2.20.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran rasio promosi ekonomi anggota dihitung dengan membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok ditambah simpanan wajib, untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Selanjutnya untuk setiap kenaikan rasio 2,5 %, nilai ditambah dengan 25

sampai dengan nilai maksimum 100. Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Untuk lebih jelasnya mengenai standar perhitungan rasio promosi ekonomi anggota dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.23

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Setelah perhitungan rasio keuangan maka akan diperoleh nilai dari masing-masing rasio tersebut kemudian menghitung skor dengan cara mengalikan nilai masing-masing rasio tersebut dengan bobot masing-masing rasio. Selanjutnya hitung jumlah total skor dan jumlah total bobot. Setelah itu, menghitung nilai bersih dengan cara membagi jumlah skor dengan jumlah bobot. Setelah nilai bersih diperoleh, bandingkan nilai bersih tersebut dengan standar Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai 80-100 maka kinerja keuangan koperasi tersebut sehat.
2. Nilai 66-80 maka kinerja keuangan koperasi dikatakan cukup sehat.
3. Nilai 51-66 maka kinerja keuangan koperasi dikatakan dalam pengawasan.
4. Nilai <51 maka kinerja keuangan koperasi dikatakan dalam pengawasan khusus.